

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara dan berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) yang menyimpan kelebihan dananya di bank dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*) yang meminjam dana pada bank. Fungsi intermediasi bank akan berjalan *optimal* jika unit *surplus* dan unit *defisit* mempercayai bank (Subuh et al., 2010). Lembaga perbankan dapat membantu pihak-pihak yang mempunyai kelebihan uang tunai, kesulitan modal, atau kekurangan keuangan. Dalam perekonomian, peran ini sangat penting dalam merangsang likuiditas keuangan. Diperlukan untuk mendorong sektor perekonomian suatu negara. Sebagai tujuan pertama perbankan sebagai lembaga perantara adalah untuk menarik nasabah agar menyimpan uangnya di bank. Bank akan menggunakan dana yang disimpannya. Mengelola dan memperluas kemampuan bank untuk meningkatkan persentase pinjaman atau memberikan kredit kepada sektor bisnis (Puji Astutik & Susilowati, 2017).

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam (Kasmir, 2014) bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak (Rivai et al., 2013).

Dalam teori permintaan menyatakan bahwa harga yang lebih rendah menyebabkan peningkatan permintaan, sedangkan harga yang lebih tinggi menyebabkan lebih sedikit permintaan. Dan ini seperti perbankan suku bunga yang lebih rendah menyebabkan peningkatan permintaan kredit publik, sementara suku bunga yang lebih tinggi menyebabkan lebih sedikit permintaan kredit. Hukum permintaan pada dasarnya adalah sebuah teori yang mengatakan, “makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut dan sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut” (Hardiansyah et al., 2021).

Permintaan kredit oleh masyarakat bergantung pada beberapa faktor seperti pendapatan, inflasi, dan tingkat suku bunga kredit. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa jika pendapatan masyarakat meningkat maka kebutuhan uang juga akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan baik konsumsi maupun investasi. Begitu pula halnya dengan inflasi. Jika terjadi inflasi maka harga barang publik meningkat yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan uang juga meningkat. Hal ini disebabkan nilai riil uang yang dimiliki masyarakat turun. Selain itu, tingkat suku bunga juga mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mengajukan permohonan

kredit. Suku bunga dapat diartikan sebagai biaya yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat penerima kredit untuk mendapatkan pinjaman (Akmal et al., 2014). Jika permintaan pada kredit mengalami peningkatan maka laju pertumbuhan pembangunan yang akan meningkatkan perekonomian mengalami penekanan. Baik pada bidang investasi pemerintah maupun swasta. Dalam suatu pembangunan diperlukan dana yang banyak baik dari pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan investasi, dan dana tersebut diperoleh dari bank. Pemerintah mendorong upaya pembangunan untuk mengatasi kesenjangan sosial, khususnya di kalangan pengusaha kecil. Salah satu yang perlu menjadi pertimbangan yakni tingkat bunga dan jangka waktu pengembalian kredit dari bank. Minimnya pendapatan masyarakat membuat pertimbangan suku bunga bank perlu dipertimbangkan dengan matang (Siwi et al., 2019).

Penyaluran kredit, khususnya kredit investasi, diharapkan dapat menggerakkan kembali sektor riil sehingga terciptanya kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Hal ini dapat berarti bahwa pertumbuhan ekonomi serta ekonomi lebih efektif jika didorong oleh investasi sehingga sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada sektor stimulant pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas kredit. Bank-bank milik pemerintah seharusnya menjadi pionir dalam memulihkan kembali fungsi intermediasi bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. Bank milik pemerintah diharapkan tidak hanya menerima dana masyarakat kemudian menyalurkannya ke pasar finansial, misalnya SBI dan obligasi pemerintah untuk

mendapatkan margin (Keuntungan) tanpa harus bekerja keras dan tanpa perasaan bersalah melihat tidak bergairahnya sektor ril (Agil et al., 2022).

Pertumbuhan kredit yang tidak diatur dapat memiliki dampak ekonomi yang merugikan, terutama jika institusi tidak dapat menganalisis potensi atau kemampuan membayar debitur secara memadai. Hal ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, *defisit* transaksi berjalan yang lebih besar, dan nilai tukar riil yang lebih kuat. Pemberian kredit kepada masyarakat umum bukan hanya sumber pendapatan utama bank, namun juga mengandung risiko. Jika penyaluran kredit bank tinggi dengan kolektibilitas yang baik, bank tidak akan mengalami masalah. Namun, jika kredit bank tidak tertagih, bank akan memiliki kualitas kredit yang buruk, dengan banyaknya kredit kurang lancar, kredit meragukan, dan kredit macet. Jika hal ini terjadi, maka penjualan dan laba perusahaan tidak akan meningkat, bahkan bisa jadi menurun. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kinerja bank dan kepercayaan masyarakat. Pada dasarnya, kredit hanya merupakan salah satu jenis jika ditinjau dari kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Namun, untuk mengidentifikasi kredit berdasarkan variabel dan unsur yang ada dalam konsep kredit, kita dapat membagi kredit ke dalam lima kategori yaitu jenis penggunaan, kebutuhan kredit, jangka waktu kredit, cara penggunaan, dan agunan (Polihu et al., 2023).

Demikian halnya dengan inflasi, inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang umum. Jika terjadi inflasi, harga-harga barang umum meningkat yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan uang juga meningkat. Akibat kenaikan harga tersebut, masyarakat memerlukan lebih banyak uang untuk

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan akan uang inilah yang menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan kredit kepada bank (G. Z. Pangandaheng et al., 2018).

Besarnya konsumsi rumah tangga bergantung pada penghasilan masing-masing rumah tangga. Perbandingan antara konsumsi dan pendapatan tersebut disebut sebagai *Marginal Propensity to Consume* (MPC). Semakin besar pendapatan yang dimiliki, maka tingkat konsumsi rumah tangga juga akan semakin tinggi. Semakin besar jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak ia melakukan konsumsi, sehingga akan menyebabkan masyarakat lebih berani untuk mengambil kredit guna memenuhi kebutuhan konsumsinya. Hal ini menandakan bahwa Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap permintaan kredit. Ketika Produk Domestik Bruto naik, menyebabkan konsumsi masyarakat juga akan naik. Naiknya konsumsi ini akan meningkatkan agregat demand. Agregat demand yang meningkat akan menyebabkan insentif juga naik, insentif yang naik menyebabkan produsen berani untuk mengambil kredit lebih banyak guna menambah faktor produksi (Ulfah, 2018).

Berikut perkembangan Suku Bunga Kredit, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Permintaan Kredit di Indonesia.

Tabel 1.1
Data Suku Bunga Kredit, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan
Permintaan Kredit Tahun 2020-2024

Tahun	Suku Bunga Kredit Investasi (%) (X₁)	Inflasi (%) (X₂)	Produk Domestik Bruto (Milyar Rupiah) (X₃)	Permintaan Kredit Investasi (Milyar Rupiah) (Y)
2020	8,88	1,68	10.722.999,30	1.446.391,94
2021	8,35	1,87	11.120.059,70	1.492.883,24
2022	8,51	5,51	11.710.223,20	1.663.995,36
2023	8,81	2,61	12.301.475,10	1.847.877,92
2024	8,71	1,57	12.920.281,70	2.080.376,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Satu Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data Diolah

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas diperlihatkan bahwa beberapa tahun dimana Suku Bunga Kredit, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Permintaan Kredit berjalan beriringan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Suku Bunga Kredit adalah sebesar 8,35% dan pada tahun 2022 sebesar 8,51% hingga tahun 2023 menjadi 8,81%, meningkatnya Suku Bunga Kredit tidak diikutinya penurunan terhadap Permintaan Kredit pada tahun 2020 sebesar 1.446.391,94 milyar rupiah hingga pada tahun 2024 sebesar 2.080.376,59 milyar rupiah. Seharusnya kenaikan ini dapat mempengaruhi Permintaan Kredit, sebab makin tinggi tingkat suku bunga maka keinginan masyarakat untuk melakukan kredit perbankan akan semakin kecil (G. Z. Pangandaheng et al., 2018).

Jika terjadi inflasi, harga-harga barang umum meningkat yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan uang juga meningkat. Inflasi yang meningkat akan menyebabkan nasabah akan menarik dana dari bank untuk memenuhi kebutuhan sehingga keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank akan

menurun (Anggraini & Fathurrahman, 2018). Tingkat inflasi mengalami fluktuasi signifikan, penurunan drastis menjadi hanya 1,57% pada tahun 2024. Tetapi tingkat inflasi terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 1,68% hingga tahun 2024 sebesar 5,51%. Hal ini tidak diikutinya dengan penurunan terhadap Permintaan Kredit pada tahun 2020 sebesar 1.446.391,94 milyar rupiah hingga pada tahun 2024 sebesar 2.080.376,59 milyar rupiah. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi biaya hidup tetapi juga dapat mengindikasikan lemahnya aktivitas ekonomi, yang berpengaruh pada Permintaan Kredit.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 10.722.999,30 milyar rupiah, diikuti pertumbuhan positif yang signifikan hingga mencapai 2.080.376,59 milyar rupiah pada tahun 2024. Dengan pertumbuhan konsumsi yang meningkat maka permintaan kredit investasi juga meningkat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Permintaan Kredit di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Suku Bunga Kredit Investasi (X_1), Inflasi (X_2) dan Produk Domestik Bruto (PDB) (X_3) terhadap Permintaan Kredit Investasi (Y) di Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga Kredit Investasi (X_1), Inflasi (X_2) dan Produk Domestik Bruto (PDB) (X_3) terhadap Permintaan Kredit Investasi (Y) di Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat lebih baik memahami tentang dampak Suku Bunga Kredit Investasi, Inflasi, dan Produk Domestik Bruto terhadap Permintaan Kredit Investasi. Sehingga membantu para peneliti mendapatkan lebih banyak wawasan tentang dinamika pasar kredit di Indonesia.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa/i dan referensi untuk penelitian berikutnya tentang Analisis Permintaan Kredit di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi referensi bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama untuk masa yang akan datang.